

BAB III

PERAN UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA DAN SRI LANKA

A. Latar Belakang Terbentuknya UNDP

Pada mulanya, UNDP hadir untuk memenuhi tujuan dari PBB sendiri, yaitu “to achieve international co-operation in solving international problem of an economic, social, cultural, or humanitarian character” dan untuk mewujudkan “higher standard of living, full employment and conditions of economic and social progress and development”. Kedua tujuan PBB itu dicapai UNDP melalui pemberian bantuan teknis pada negara-negara berkembang demi terciptanya kesejahteraan dunia.

Dalam membantu pembangunan negara berkembang, kerja sama dalam bentuk pemberian bantuan teknis (technical aid) sangat diperlukan dan esensial perannya. Bantuan teknis tersebut dapat membantu negara berkembang untuk mencapai self-reliance dengan memfasilitasi dan mendukung investasi, pembangunan sumber daya manusia, riset dan pelatihan, dan dengan memperkuat kapabilitas nasional untuk pembangunan negara tersebut.

Bantuan teknis yang diberikan juga berfokus pada usaha perbaikan perumahan, fasilitas umum, pelayanan sosial. Kesemuanya dilakukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan (living conditions) di negara berkembang, untuk membantu pembangunan kapasitas pembangunan nasional, serta untuk membantu negara tersebut dalam berbagai masalah hubungan dengan kependudukan. Urgensi akan bantuan teknis bagi negara berkembang inilah yang kemudian mendorong PBB untuk mendirikan suatu badan yang berfokus pada usaha perbaikan kondisi pembangunan negara-negara berkembang.

UNDP memiliki dua macam program, program lima-tahun pembangunan, dan program intercountry. Kedua program tersebut menyediakan dan mengkoordinasikan aktivitas pembangunan di hampir setiap sektor ekonomi dan sosial termasuk di dalamnya, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, manufaktur, energi, transportasi, komunikasi, perumahan dan pembangunan gedung, perdagangan dan turisme, nutrisi, kesehatan, sanitasi, perlindungan alam, pendidikan dan pelatihan, pembangunan masyarakat, kesejahteraan sosial, perencanaan ekonomi, dan administrasi publik. Proyek-proyek UNDP bertujuan untuk membantu negara berkembang agar dapat menggunakan sumber daya alam dan sumber dayamanusianya dengan baik, meningkatkan standar kehidupan, mempertinggi produktivitas, dan agar dapat berkontribusi pada perekonomian dunia.(Erika, 2008)

B. Tujuan United Nations Development Programme (UNDP)

Sama halnya seperti organisasi-organisasi lainnya, UNDP mempunyai tujuan untuk menjadi perantara untuk pembangunan yang terjadi di negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan UNDP melaksanakan programnya. Adapun secara umum UNDP memiliki tiga tujuan umum yaitu :

1. Membantu PBB menjadi suatu badan dengan kekuatan besar dan kohesif dalam pembangunan umat manusia.
2. Memfokuskan pada sumber daya yang dimiliki oleh PBB dalam rangka menjalankan semua tujuan dalam pembangunan umat manusia seperti: mengurangi tingkat kemiskinan, kelestarian lingkungan, penciptaan lapangan kerja dan kesetaraan gender.
3. Memperkuat kerjasama internasional dalam pembangunan manusia dan menjadi sumbu besar dalam pencapaian pembangunan manusia tersebut.(Library, 2010).

C. Program United Nations Development Programme (UNDP)

UNDP dan staf kantor di atas tanah di 166 negara, bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk membantu mereka menemukan solusi untuk global dan tantangan pembangunan nasional. UNDP berfokus pada enam program pembangunan terutama :

1. Mendukung Pemerintahan Dengan Sistem Demokratis

UNDP mendukung pemerintahan demokratis nasional transisi demokratis dengan menyediakan nasihat kebijakan dan dukungan teknis, peningkatan kapasitas kelembagaan dan individu dalam negara, dan mendidik masyarakat tentang advokasi untuk reformasi demokrasi, mempromosikan dialog dan negosiasi, dan berbagi pengalaman sukses dari negara lain dan lokasi. UNDP juga mendukung lembaga-lembaga demokratis yang ada dengan meningkatkan dialog, meningkatkan debat nasional, dan memfasilitasi konsensus nasional pada program-program pemerintahan.

2. Menanggulangi Kemiskinan

UNDP membantu negara-negara mengembangkan strategi untuk memerangi kemiskinan oleh memperluas akses terhadap kesempatan ekonomi dan sumber daya, program-program yang menghubungkan kemiskinan dengan negara tujuan dan kebijakan yang lebih besar, dan memastikan suara yang lebih besar bagi masyarakat miskin. UNDP juga bekerja di tingkat makro untuk reformasi perdagangan, mendorong utang dan investasi asing, yang paling miskin dan memastikan masyarakat miskin mendapatkan keuntungan dari globalisasi.

Di lapangan, UNDP sponsor pembangunan proyek-proyek percontohan, mempromosikan peran perempuan dalam pembangunan, dan upaya koordinat antara pemerintah, LSM, dan donor luar. Dengan cara ini, UNDP bekerja sama dengan pemimpin lokal dan pemerintah untuk

memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk membuat usaha dan meningkatkan kondisi ekonomi. Misalnya saja Indonesia, yang memprihatinkan, kualitas manusia Indonesia benar - benar jauh lebih rendah dari Singapura (25), Brunei (33), Malaysia (58), Thailand (76), dan Filipina (83). Bahkan lebih rendah dari negara-negara "terbelakang" seperti Kirgistan (110), Guinea-Katulistiwa (109), dan Aljazair (108).

3. Pencegahan Krisis dan Pemulihan Setelah Krisis

UNDP bekerja untuk mengurangi risiko bencana atau konflik bersenjata, dan memajukan pemulihan dini setelah krisis yang terjadi. UNDP bekerja melalui kantor-kantor negara untuk mendukung pemerintah daerah dalam penilaian kebutuhan, pengembangan kapasitas, koordinasi perencanaan, dan kebijakan dan standar pengaturan.

Contoh program-program pengurangan resiko UNDP meliputi upaya untuk mengendalikan proliferasi senjata ringan, strategi untuk mengurangi dampak bencana alam, dan program untuk mendorong penggunaan diplomasi dan mencegah kekerasan. Pemulihan termasuk program-program senjata, demobilisasi dan reintegrasi dari mantan kombatan, demining usaha, program untuk reintegrate orang pengungsi, pemulihan pelayanan dasar, dan sistem keadilan transisional untuk memulihkan negara dari peperangan.

4. Menanggulangi Masalah Lingkungan dan Energi

Sebagai masyarakat miskin disproportionately dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan dan kurangnya akses kebersihan, energi terjangkau layanan, UNDP berusaha untuk menangani masalah-masalah lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan ke negara-negara berkembang untuk mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan.

UNDP bekerja sama dengan negara-negara untuk memperkuat kapasitas mereka untuk menangani masalah-masalah lingkungan global dengan menyediakan nasihat kebijakan inovatif dan menghubungkan mitra lingkungan sensitif melalui proyek-proyek pembangunan yang membantu masyarakat miskin membangun mata pencaharian berkelanjutan.

5. Melakukan Penanggulangan HIV / AIDS

HIV / AIDS adalah masalah besar dalam masyarakat hari ini dan UNDP bekerja untuk membantu negara-negara mencegah penyebaran lebih lanjut dan mengurangi dampaknya. UNDP lingkungan berfokus pada strategi efektif air pemerintahan, akses terhadap layanan energi yang berkelanjutan, pengelolaan lahan yang berkelanjutan untuk memerangi desertification dan degradasi lahan, konservasi dan penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati, dan kebijakan untuk mengendalikan emisi dari polusi dan merusak ozon depleting-benda.

Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia yang ke-20, ada beberapa berita yang menggembirakan. Laporan Epidemi AIDS Global yang baru dirilis tahun 2008 menunjukkan penurunan tingkat infeksi HIV di beberapa negara di seluruh dunia. Berita ini seharusnya mengobarkan harapan dan menyemangati kembali aksi-aksi kita. Tetapi, kita sepatutnya tidak berpuas diri karena laporan yang sama mencatat bahwa di beberapa negara lain tingkat infeksi masih meningkat.

Tema Kampanye Hari AIDS Se-Dunia hari ini adalah “Lead – Empower – Deliver” bertujuan untuk lebih fokus pada kebutuhan akan akses publik atas pencegahan HIV, pengobatan, perhatian dan dukungan pelayanan. Walaupun kita sudah membuat perkembangan yg substansial selama lebih dari 2 dekade ini dalam melawan stigma atas AIDS, kita harus terus berjuang sebelum

kita dapat berkata dengan yakin bahwa orang yg terinfeksi HIV mendapatkan manfaat dari seluruh hak dan perlindungannya.

Bekerja bersama dengan badan-badan PBB sebagai sponsor atas program PBB gabungan untuk AIDS (UNAIDS), UNDP mempunyai tanggung jawab khusus untuk menjembatani hubungan antara HIV, kemiskinan, dan pembangunan, juga persamaan gender dan hak asasi manusia. UNDP berusaha untuk mencapai ini melalui beragam cara diseluruh dunia. UNDP menyadari bahwa strategi pengurangan kemiskinan tidak akan lengkap tanpa menyinggung HIV kehilangan orang tua dan penduduk produktif tidak hanya berimbas pada keluarga mereka, tetapi juga sekolah, pemerintah, pertanian dan setor-sektor sosial lain yang produktif. (Wulansari, 2011).

D. Keberadaan United Nations Development Programme (UNDP) di Indonesia

Di Indonesia, UNDP bekerja untuk memajukan pembangunan manusia; memerangi kemiskinan dan kesenjangan; mengkonsolidasikan pemerintahan yang demokratis, dukungan pencegahan krisis nasional dan tingkat lokal; dan pemulihan; dan meningkatkan pembangunan lingkungan yang cerdas. UNDP juga terlibat penuh dalam memerangi HIV dan AIDS dan promosi kesetaraan gender.

UNDP Indonesia didedikasikan untuk lima komitmen Deklarasi Paris tentang Efektifitas Bantuan, didukung oleh 117 negara-negara donor, termasuk Indonesia, yaitu:

1. Kepemilikan nasional
2. Keselarasan dengan prioritas nasional
3. Harmonisasi donor
4. Pengelolaan untuk hasil

5. Saling akuntabilitas.

Pekerjaan UNDP di Indonesia merupakan bagian integral dari United Nations Development Assistance Framework for Indonesia (2006-2010) dan diatur oleh Program Negara UNDP periode yang sama, ditandatangani dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 2005. Di Indonesia, UNDP bekerja di beberapa bidang prioritas:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Millenium Development Goals. UNDP bekerja untuk mendukung Indonesia memerangi melawan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan antara kelompok dan daerah, dan membantu mencapai delapan Tujuan Pembangunan Milenium tahun 2015 di seluruh negeri. Dalam konteks ini, UNDP telah mengidentifikasi lima bidang kunci.

2. Pemerintahan demokratis, dukungan UNDP terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia termasuk nasihat kebijakan dan bantuan teknis, penguatan kapasitas lembaga, mempromosikan dan dialog brokering, dan terlibat dalam jaringan pengetahuan dan berbagi praktekpraktek yang baik. Tiga bidang prioritas:

a. Mempromosikan pendalaman demokrasi melalui pemilu dan memperkuat dukungan parlemen.

b. Mendukung desentralisasi dan reformasi tata pemerintahan lokal.

c. Mempromosikan akses berbasis hak asasi manusia hukum dan reformasi sektor keadilan, dengan tujuan untuk meningkatkan terhadap keadilan bagi orang miskin dan kelompok rentan.

3. Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, UNDP terlibat dalam proyek seri untuk memastikan bahwa langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan pembangunan berkelanjutan. Bermitra dengan badan-badan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, UNDP bertujuan untuk terus mengintegrasikan pertimbangan lingkungan strategis dalam perumusan kebijakan dan proses perencanaan yang dikombinasikan dengan peningkatan kapasitas yang efektif untuk mendukung pelaksanaan yang memberikan dampak signifikan terhadap tanah.

Tiga kunci bidang fokus UNDP:

a. Tingkat nasional aksi adaptasi perubahan iklim, dengan fokus pada analisis, saran kebijakan dan perencanaan strategis.

b. Aksi di tingkat masyarakat untuk pengelolaan yang lebih baik dari lingkungan, dengan fokus pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui perlindungan kehutanan, meningkatkan manajemen lingkungan, dan promosi energi berkelanjutan.

c. Tabungan lapisan ozon dengan mengimplementasikan Protokol Montreal.

4. Pencegahan Krisis dan Pemulihan, Indonesia adalah salah satu negara yang paling rawan bencana di dunia. Bencana alam mengancam pembangunan manusia dan merongrong pencapaian Millenium Development Goals. Konflik Sosial juga merupakan hambatan serius pembangunan. Oleh karena itu UNDP memberikan prioritas utama untuk mendukung pencegahan krisis dan upaya pemulihan di Indonesia. Tiga prioritas utama:

a. Pembangunan perdamaian melalui promosi pemerintahan lokal yang baik, pemberdayaan masyarakat, dan kesempatan ekonomi.

b. Mitigasi bencana dan pengurangan risiko.

c. Pemulihan bencana, masyarakat kembali pada kaki mereka dan membangun kembali kapasitas pemerintahan daerah setelah terkena bencana. (UNDP Indonesia, 2013).

E. Inisiatif Program UNDP di Indonesia

1. Pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia

Pada tahun 2011 menandai ulang tahun ke-11 dari Deklarasi Milenium, ketika negara-negara di seluruh dunia disetujui delapan Millennium Development Goals (MDGs). Meskipun Indonesia sebagian besar on-track untuk mencapai banyak target MDGs tahun 2015 batas waktu, kemajuan terhadap MDGs tidak merata.

Kemiskinan (MDG 1) adalah tantangan di Indonesia meskipun pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dalam beberapa dekade terakhir. Menurut Badan Pusat Statistik, hampir 30 juta orang, atau 12,36 persen, di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional. daerah tertentu dari Indonesia juga lebih miskin daripada yang lain; dengan tingkat kemiskinan di daerah seperti Papua, dan Papua Barat lebih dari dua kali lipat dari rata-rata nasional

Di bidang kesehatan ibu (MDG 5), penyedia layanan kesehatan yang terampil menghadapi hampir semua kelahiran di Jakarta dibandingkan dengan kurang dari setengah di lima provinsi lain di Indonesia. Dalam hal akses ke air minum yang aman (MDG 7), Jakarta, Bali dan Jogjakarta jauh melampaui Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Kalimantan Tengah, dengan lebih dari 70 persen orang dengan akses ke air minum yang aman di bekas, dibandingkan untuk kurang dari 30 persen di kedua.

UNDP, dalam kemitraan dengan Pemerintah Indonesia, adalah bekerja menuju pencapaian MDGs dan pengentasan kemiskinan dengan menggambar pada kekayaan pengetahuan dan

jaringan yang luas dari kantor UNDP berpengalaman lainnya di seluruh dunia. UNDP berusaha untuk membangun kuat proses pembuatan kebijakan pemerintah propoor, perencanaan dan penganggaran, untuk meningkatkan pelayanan, dan untuk mempercepat pencapaian MDGs. Karena kemajuan yang tidak merata terhadap MDG prestasi dan pengurangan kemiskinan, UNDP berkonsentrasi sumber daya pada tiga daerah di Indonesia yang paling menantang dan terbelakang, termasuk Tanah Papua (Papua dan Papua Barat provinsi), Aceh, dan NTT.

a. Membangun kerangka kelembagaan yang lebih baik untuk mengurangi kemiskinan

UNDP mengutamakan upaya pengurangan kemiskinan di Tanah Papua, Aceh dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2015, UNDP berupaya untuk meningkatkan efektivitas pemerintah nasional dan subnasional, dan efektivitas pemangku kepentingan utama, dalam mengurangi kemiskinan dan kerentanan. UNDP mengutamakan upaya pengurangan kemiskinan di Tanah Papua, Aceh dan Nusa Tenggara Timur.

Upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah-driven harus ditanggung oleh kebijakan yang sehat, perencanaan dan penganggaran. Jika ketiga komponen ini tidak di tempat, upaya ini untuk mengurangi kemiskinan cenderung tidak efektif. Dengan pemikiran ini, UNDP mendukung Peraturan Presiden No 65/2011 ini dan 66/2011 tentang 'Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat' dan 'Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B)' di 2011. Kebijakan Percepatan pembangunan dan program oleh pemerintah nasional dan subnasional untuk Tanah Papua sekarang dikoordinasikan melalui satu tubuh di bawah Kantor Wakil Presiden, daripada beberapa badan pemerintah, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan penyatuan sumber daya.

Pada tingkat subnasional, UNDP didukung pemerintah provinsi dan kabupaten termasuk Papua dan Papua Barat, untuk mulai mengintegrasikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

target MDG dan perencanaan pro-poor, penganggaran dan pemantauan (P3BM) alat dalam Pembangunan Jangka Menengah Rencana. rencana pembangunan sebelumnya telah dimanfaatkan pertumbuhan ekonomi sebagai metrik utama untuk mengukur kemajuan pembangunan. Dengan memberikan pemerintah daerah dengan alat yang lebih akurat untuk mengukur dan memantau tingkat kemiskinan, diharapkan bahwa mereka akan lebih siap untuk merumuskan respons kebijakan yang ditargetkan memenuhi kebutuhan pembangunan yang paling mendesak dan efektif mengurangi kemiskinan. indikator awal yang positif; di Papua Barat, kemiskinan menurun dari 34,88 persen (2010) menjadi 31,92 persen; sementara di Papua, kemiskinan menurun dari 36,80 persen (2010) menjadi 31,98 persen (2011).

Sebagai hasil dari lobi yang luas dari program pembangunan termasuk Belanda dan Selandia Baru Governments funded UNDP 'Program Pembangunan Centred Rakyat' (PCDP), pemerintah subnasional dari Papua dan Papua Barat telah meningkatkan anggaran tahunan mereka pada pendidikan dan kesehatan dari dua (2006) untuk 12,3 persen (2011). Pemerintah kabupaten termasuk Timika, Yapen dan Sarmi telah mulai mereplikasi elemen dari program PCDP dan kontrak CSO lokal sebagai penyedia layanan untuk orang-orang yang tinggal di daerah terpencil dengan dana yang bersumber dari dalam anggaran mereka sendiri.

b. Memperluas akses ke perlindungan sosial dan layanan penting

Selama tahun 2011 ke 2015, UNDP bekerja terhadap peningkatan akses dan kualitas perlindungan sosial dan layanan penting lainnya. Di daerah terpencil dan pedesaan, pengiriman perlindungan sosial dan layanan penting lainnya untuk kelompok miskin dan rentan bahkan lebih menantang karena infrastruktur yang buruk seperti jalan, dan karena geografi Indonesia yang unik. UNDP bekerja sama dengan Badan Masyarakat Desa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (BPMK & KK) di Papua dan Papua Barat untuk memastikan adopsi kesehatan dan pendidikan

sistem dan prosedur standar oleh OMS, dan pengawasan suara atas penyediaan layanan tersebut melalui joint-monitoring. Selama July-December 2011, CSO memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada sekitar 37.135 orang, termasuk 17.584 orang, 14.675 perempuan, 4.877 anak-anak, dan 5.068 orang tak dikenal berdasarkan jenis kelamin atau usia. Pada 2012, diproyeksikan bahwa dua persen dari populasi Tanah Papua akan menerima pelayanan kesehatan dan pendidikan dari UNDP dan BPMK didukung OMS. Dari angka ini, sekitar 90 persen dari yang ditargetkan akan asli Papua dan Papua Barat.

2. Tata Pemerintahan demokratis

Pemerintah Indonesia dan mitra pembangunan sepakat bahwa pemerintahan yang baik adalah salah satu kunci untuk mencapai kemajuan yang sama dan memerangi kemiskinan. Terwujudnya masyarakat demokratis berdasarkan aturan hukum, konsolidasi institusi demokrasi dan penguatan otonomi desentralisasi dan regional, serta organisasi masyarakat sipil dan partai politik semua termasuk dalam tujuan pembangunan nasional dan Nasional 2010-2014 Rencana Pembangunan Jangka menengah. Sebagai negara demokrasi muda dan bersemangat, Indonesia telah mencapai banyak, dan terus berjuang untuk memastikan demokrasi yang menguntungkan warganya. Demokrasi di Indonesia terus berkembang dan meningkatkan, seperti dapat dilihat dalam Indeks Demokrasi Indonesia, yang meningkat pada rating dari 60,4 persen menjadi 67,3 persen pada tahun 2009.

UNDP berfokus pada mendukung Pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk mencapai pemerintahan yang terdesentralisasi yang efektif dengan memperjelas dan memperkuat peran pemerintah provinsi, sementara secara bersamaan menciptakan kerangka hukum yang kondusif bagi pihak yang berwenang Membangun dukungan sukses kepada Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, UNDP juga bekerja untuk membangun kapasitas lembaga-lembaga nasional

dan lokal untuk meningkatkan akses dan pemberian keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, termasuk perempuan. Mempromosikan representasi dan partisipasi masyarakat, termasuk kelompok-kelompok masyarakat sipil dan perempuan dalam lembaga-lembaga politik dan pemerintah adalah tujuan kunci dari UNDP

a. Desentralisasi Pemerintahan

Untuk 2011-2015 UNDP bertujuan untuk mendukung pemerintah provinsi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan mereka untuk menjalankan fungsi mereka, mencapai tujuan mereka, dan meningkatkan akuntabilitas dan responsif mereka. Penguatan kapasitas pemerintah provinsi tetap tantangan, terutama karena peran pemerintah provinsi dalam konteks desentralisasi tidak didukung dengan peraturan dan kebijakan yang jelas dan memadai, meskipun pencairan antara 30 sampai 40 persen dari anggaran nasional ke provinsi tingkat. UNDP memberikan kontribusi untuk upaya untuk meningkatkan kebijakan dan kerangka peraturan yang memperjelas dan memperkuat peran dan fungsi pemerintah provinsi dan parlemen.

Draf revisi UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sekarang siap untuk diperiksa parlemen, dan mengamanatkan pemerintah provinsi untuk berkoordinasi dan memantau pembangunan daerah di tingkat kabupaten / kota. Dengan alokasi anggaran untuk pembangunan daerah di tingkat kabupaten dan kota telah meningkat pada masa lalu, provinsi memiliki peran penting untuk bermain, misalnya, dalam menciptakan lebih banyak kesempatan bagi orang untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan ekonomi regional, dan menyediakan akses yang lebih besar ke layanan publik.

Salah satu contoh dari pekerjaan UNDP berkaitan dengan program di Aceh dan Nias, di mana, pada tahun 2011, UNDP mendukung penguatan dan sertifikasi dari Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aceh, dan juga dibantu kedua daerah dan kabupaten untuk meningkatkan sistem

pengelolaan aset dan keuangan mereka. Inisiatif ini bertujuan baik memastikan bahwa provinsi memiliki lembaga yang lebih efektif serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh lembaga pemerintah.

UNDP juga telah mendukung pemerintah provinsi dalam menggunakan Laporan Pembangunan Manusia Provinsi (dan indeks terkait) sebagai alat untuk meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran. Percepatan Millennium Development Goals (MDG) di provinsi tetap didukung melalui integrasi Perencanaan Pro-Poor, Penganggaran dan Pemantauan (P3BM) alat dan MDGs ke dalam proses perencanaan daerah, yang dimiliki dan diawasi oleh provinsi dan kabupaten berwenang.

b. Pencegahan Krisis dan Pemulihan

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang rawan bencana yang paling di dunia, rentan terhadap tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 644 bencana terjadi di tahun 2010; mengklaim kehidupan 1.711 orang, sedangkan 1.398.923 orang terluka atau dilaporkan hilang. Sebanyak 14.639 rumah yang rusak berat, sementara 2.839 rumah yang rusak sedang dan 25.030 rumah rusak ringan. mitigasi yang efektif dari dampak ekonomi dan sosial dari bencana masih menjadi tantangan. Menurut Bencana Alam Risiko Atlas (2011), dari 196 negara, Indonesia memiliki risiko ekonomi tertinggi kesembilan dari bencana alam.

Melalui Rehabilitasi berbasis Pengurangan Risiko Bencana dan Rekonstruksi (DR4) proyek, UNDP telah bekerja sama dengan mitra untuk mengembangkan Indonesia-spesifik Kebutuhan Pasca Bencana Assessment (I-PDNA) metodologi dan alat, berdasarkan kerangka PDNA global yang dikembangkan bersama oleh Bank dunia, Uni Eropa dan Development Group PBB (UNDG).

Pada tahun 2011, UNDP, dalam kemitraan yang erat dengan Pemerintah Indonesia, bekerja untuk memastikan kebijakan dan kerangka regulasi berada di tempat untuk meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap krisis dan guncangan eksternal. UNDP juga terus memperkuat kapasitas lembaga-lembaga nasional dan subnasional, dan bahwa forum multipihak, dalam pencegahan konflik, pemulihan pascakrisis, dan pengurangan risiko. Bantuan untuk lembaga-lembaga ini dan forum sudah termasuk dukungan untuk pengembangan dan penerapan alat manajemen krisis yang tepat dan mekanisme. (UNDP Indonesia, 2013)

F. Pencapaian UNDP di Indonesia

UNDP membantu melatih lebih dari 1.000 pejabat pemerintah kabupaten, anggota parlemen lokal dan pemimpin LSM untuk menggunakan peta kemiskinan, Scorecard MDG dan analisis anggaran pro-poor untuk perencanaan dan penganggaran mereka. Akibatnya, alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan manusia di 18 kabupaten meningkat rata-rata 17 persen. UNDP bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mempromosikan mengintegrasikan model pro-miskin perencanaan, penganggaran, dan pemantauan di seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia. Sejak tahun 2006, UNDP telah memberikan dukungan penting untuk program HIV / AIDS nasional Indonesia, membantu untuk membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan menyalurkan sumber daya multi donor melalui Dana Kemitraan Indonesia. Dengan bantuan dukungan UNDP, pada tahun 2010 Komisi dinilai sebagai memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola dana donor langsung. Perbaikan substansial dalam kapasitas, koordinasi dan pendanaan mulai berdampak pada negara; yaitu proporsi penduduk berusia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV / AIDS meningkat dari 2,6% pada tahun 2007 menjadi 19,8% pada tahun 2010 untuk perempuan dan 1,4% untuk laki-laki. Selain itu, tingkat kasus HIV baru per tahun menurun dari 4.969 pada 2008 menjadi 2.753 pada 2010. UNDP juga

telah mendukung penerbitan kertas kebijakan Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan. (UNDP Indonesia, 2013).

G. Keberadaan United Nations Development Programme (UNDP) di Sri Lanka

Berakhirnya konflik 27 tahun Sri Lanka telah membuka kemungkinan periode baru perdamaian dan kemakmuran berkelanjutan. Meskipun konflik, tsunami 2004 dan dampak resesi global, negara telah mencapai status pendapatan menengah. Dengan lahan seluas 65.610 kilometer persegi dan jumlah penduduk 20,3 juta, Sri Lanka mencapai skor 0,691 pada Indeks Pembangunan Manusia 2011, peringkat 97th dari 187 negara, yang tertinggi di Asia Selatan. nilai HDI Sri Lanka untuk 2012 adalah 0,7151 menempatkan negara dalam kategori pembangunan manusia tinggi untuk pertama kalinya dan posisi negara pada 92 dari 187 negara dan wilayah. Sri Lanka adalah posisi yang baik untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015.

Kebijakan Pembangunan Nasional Kerangka Visi, Mahinda Chintana 2011-2016 , Mengakui bahwa Sri Lanka tidak bisa mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja. Negara ini juga harus memastikan bahwa orang-orang yang memiliki akses yang adil untuk infrastruktur, layanan dan kesempatan ekonomi sehingga mereka dapat mengambil keuntungan penuh dari buah investasi publik dan swasta. Tujuan Pemerintah dalam Mahinda Chintana adalah untuk melestarikan nilai-nilai budaya Sri Lanka dan tradisi sementara mengembangkan ekonomi berbasis pengetahuan dengan standar hidup yang lebih baik bagi semua orang. (UNDP In Sri Lanka, 2012).

1. Latar Belakang UNDP di Sri Lanka

Sejak tahun 1967, sebagai mitra pembangunan utama di Sri Lanka, UNDP telah bekerja untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Sebagai lengan pengembangan PBB, tujuan menyeluruh UNDP adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan kehidupan orang-orang.

Bekerja sama dengan Pemerintah di tingkat nasional, regional dan lokal, dan masyarakat sipil dan sektor swasta, kerja UNDP membentang di pengentasan kemiskinan, pemerintahan yang demokratis, pencegahan krisis dan pemulihan dan kelestarian lingkungan. UNDP bangga telah bekerja dengan orang-orang dari Sri Lanka selama hampir lima dekade, dan kini difokuskan untuk membantu negara mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan melalui Sasaran Global. (UNDP In Sri Lanka, 2012).

2. Program United Nations Programme (UNDP) di Sri Lanka

Mulai tahun 2013, Negara Program UNDP akan fokus pada dua bidang luas: Pemerintahan Pemberdayaan dan Inklusi Sosial, yang akan mencakup bekerja pada sosio-ekonomi pemulihan dan pembangunan, inklusi sosial, supremasi hukum dan akses terhadap keadilan, pemerintahan daerah, hak asasi manusia dan dukungan parlemen, dan Keberlanjutan Lingkungan dan Ketahanan bencana, dengan fokus pada manajemen berbasis ekosistem sumber daya alam, energi bersih, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko mitigasi dan bencana.

Dalam program baru, UNDP akan bekerja dengan pemerintah nasional dan lokal dan sektor swasta, sementara meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dan masyarakat memungkinkan mereka untuk bersama-sama merencanakan, melaksanakan, memantau dan mempertahankan pembangunan sosial-ekonomi. UNDP juga akan bertujuan untuk menciptakan mata pencaharian yang berkelanjutan dan melindungi hak asasi manusia dengan perhatian khusus pada kebutuhan terpinggirkan, termasuk rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, pemuda, pekerja sektor perkebunan dan masyarakat yang terkena dampak konflik. UNDP akan terus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, membangun hubungan yang erat dengan instansi Pemerintah dan lain-lain. UNDP akan bekerja di tingkat nasional pada isu-isu kebijakan dan di tingkat lokal pada

pembangunan ekonomi lokal, penguatan pemerintahan lokal dan kelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana, membangun hubungan yang erat dengan Pemerintah.

a. Pengurangan kemiskinan

Sri Lanka telah siap untuk secara signifikan mempercepat pembangunan manusia tahun-tahun mendatang, sementara memanfaatkan peluang yang muncul dan bersaing dengan tantangan yang ada. Meskipun perang tiga dekade, tahun 2004 tsunami dan dampak dari resesi global, negara telah mencapai status berpenghasilan menengah dan berada di trek untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) dari mengurangi separuh kemiskinan pada tahun 2015. Namun, variasi ada di tingkat regional dan antar kelompok sosial-ekonomi yang berbeda. The Uva, Tengah dan Sabaragamuwa provinsi, khususnya, yang meliputi banyak perkebunan, masih menderita dari tingkat kemiskinan yang tinggi, kelaparan dan kekurangan gizi.

Sejalan dengan prioritas MDG nasional, dukungan UNDP di bidang pengurangan kemiskinan bertujuan mempromosikan pertumbuhan yang pro-miskin yang adil dan berkelanjutan dan mengatasi kesenjangan antar daerah, melalui penciptaan kesadaran, meningkatkan pengumpulan data dan penguatan kemampuan perencanaan. daerah ini, banyak dukungan UNDP akan difokuskan pada dukungan kebijakan, penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem.

UNDP akan terus mendukung pemerintahan yang responsif, penguatan kapasitas lembaga pemerintahan daerah, seperti kabupaten dan sekretariat provinsi dan dewan provinsi sehingga mereka mampu memberikan layanan berkualitas secara efisien dan transparan dan dalam mode akuntabel itu, UNDP bekerja untuk memperkuat akses terhadap keadilan dan menangani menekan masalah hak asasi manusia dari kelompok yang paling dirugikan, termasuk rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, pemuda, pekerja sektor perkebunan dan masyarakat yang terkena dampak konflik

b. Pencegahan Krisis dan Pemulihan

Mendukung masyarakat yang terkena dampak hampir tiga dekade konflik karena mereka secara bertahap bergerak dari bantuan ke pemulihan dan pembangunan adalah fokus utama dari pekerjaan kami. Dalam melakukannya, kita mendukung upaya yang bertujuan membantu pengungsi untuk kembali dengan selamat ke komunitas mereka, menciptakan mata pencaharian yang berkelanjutan dan mengatasi paling mendesak keadilan dan hak asasi manusia keprihatinan mereka. Selain itu, membantu dalam upaya untuk mengelola risiko bencana juga merupakan bagian inti dari pekerjaan kami. Dengan Sri Lanka menjadi semakin rentan terhadap bencana alam, pekerjaan UNDP termasuk mempromosikan pengurangan risiko bencana dan ketahanan.

UNDP mendukung masyarakat yang sebelumnya terkena dampak konflik untuk bermigrasi dari subsisten ke pasar mata pencaharian dan membangun hubungan antara mereka dan sektor swasta sehingga mereka dapat mengakses pasar baru dan jasa keuangan. UNDP akan terus menyatukan masyarakat yang berbeda disimpan terpisah oleh konflik, dan memberikan dukungan bagi orang-orang yang rentan untuk mendapatkan dokumentasi penting yang akan memberikan mereka akses yang lebih besar ke pengadilan. Dalam mitigasi bencana alam, UNDP akan membantu mengembangkan kapasitas nasional untuk merespon bencana dan mitigasi risiko yang mereka ajukan.

c. Lingkungan dan Energi

Isu lingkungan dan risiko bencana yang signifikan sebagai Sri Lanka bergerak maju pada lintasan pembangunan. Setiap satu dolar yang diinvestasikan dalam pengurangan risiko menyimpan empat dolar dalam menanggapi bencana. Sri Lanka adalah rumah bagi kekayaan sumber daya alam dan kaya akan keanekaragaman hayati. Namun, 21 spesies amfibi dianggap punah dan 52 dianggap berada di bawah ancaman. UNDP telah membangun hubungan dekat

dengan badan-badan pemerintah dan lain-lain pada isu-isu lingkungan dan akan mendukung agenda nasional untuk pembangunan berkelanjutan.

Di bidang Energi, Lingkungan dan Manajemen Risiko Bencana, UNDP akan bekerja di tingkat nasional, sub-nasional dan masyarakat, dan mempromosikan kelestarian lingkungan, energi terbarukan, ketahanan iklim dan manajemen risiko bencana. Ini akan mendukung Pemerintah untuk memenuhi kewajiban internasionalnya mengenai perlindungan lingkungan, termasuk kepatuhan terhadap tiga konvensi Rio, memperkuat kerangka kelembagaan dan kebijakan untuk keberlanjutan lingkungan dan pengurangan risiko bencana. juga akan membantu mempromosikan kemitraan, berbagi pengetahuan tentang praktik terbaik, selatan-selatan kerjasama dan memberikan hibah dan bantuan teknis dalam mendukung upaya yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.(UNDP In Sri Lanka, 2012)

3. Pencapaian UNDP di Sri Lanka

UNDP telah terlibat dalam Sri Lanka selama lebih dari enam dekade dan karena transit ke program baru, itu dibangun di atas hasil yang dicapai sejauh ini. Sebagai buntut dari konflik, UNDP membantu masyarakat membangun kehidupan yang produktif dan membangun kembali infrastruktur skala kecil. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk menjadi lebih tangguh dengan terlibat dalam perencanaan tingkat desa, membangun siklon dan banjir rumah tahan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk merespon bencana.

UNDP telah memainkan peran kunci dalam meningkatkan kinerja sektor publik. Ini mendukung upaya Pemerintah Sri Lanka untuk meningkatkan pemantauan arus bantuan (seperti yang diidentifikasi dalam agenda Paris) melalui pembentukan Sistem Terpadu Nasional Informasi Data (Indis). database memonitor berbagai indikator kinerja utama, termasuk berbagai parameter berdasarkan Manajemen berbasis Hasil (RBM) prinsip. Database, bertempat di Departemen

Keuangan, memperkuat akuntabilitas penggunaan dana dan akhirnya, pengelolaan bantuan. Sistem Indis juga memiliki kemampuan mengelola evaluasi proyek pembangunan masa lalu, yang meliputi pelajaran. Hal ini akan meningkatkan pengembangan proposal proyek. Pada tahun 2011, dengan dukungan teknis UNDP, Departemen Keuangan dan Perencanaan membuatnya wajib untuk menggunakan teknik RBM untuk memantau kinerja dan penyusunan anggaran.

Dalam mendukung struktur pemerintahan, UNDP telah membangun kapasitas lengan pusat dan dekonsentrasi dari pemerintah, serta lembaga yang dipilih secara lokal. Ini sekarang dalam posisi menguat untuk merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan, dengan menggunakan berbagai sumber informasi, dan mengadopsi praktik terbaik untuk membangun desain dan penggunaan lahan.

UNDP telah membangun hubungan dekat dengan badan-badan pemerintah dan lembaga terkait lainnya pada isu-isu lingkungan dan posisi yang baik untuk mendukung agenda nasional untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam meningkatkan respon terhadap bencana, UNDP telah memberikan bantuan teknis dan pelatihan untuk memperkuat Pusat Penanggulangan Bencana Nasional. UNDP didukung lebih dari 30 instansi pemerintah yang terlibat dengan pengembangan, konservasi dan perencanaan untuk melakukan Penilaian Strategis Lingkungan Terpadu untuk Provinsi Utara yang terkena dampak konflik, yang didirikan baseline lingkungan dan dipetakan daerah arkeologi penting dan koridor satwa liar.

UNDP menugaskan Laporan Pembangunan Manusia Nasional 2014. Diakui sebagai masukan yang bermanfaat bagi APBN untuk 2013, NHDR meneliti kesenjangan sosial dan ekonomi di seluruh wilayah geografis Sri Lanka dan di berbagai kelompok populasi dan menilai kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pemerintahan sektor. Ini berfungsi sebagai alat advokasi karena menempatkan sebagainya seperangkat rekomendasi kebijakan untuk membantu mengatasi

kesenjangan, memungkinkan orang Sri Lanka untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam kemajuan sosial-ekonomi secara keseluruhan. (UNDP In Sri Lanka, 2012)